



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PUSAT VETERINER FARMA

JALAN JENDERAL A.YANI 68 - 70, SURABAYA 60231
TELEPON (031) 8291124 - 8291125, FAKSIMILI (031) 8291183
Website : pusvetma.ditjennak.pertanian.go.id E-mail : pusvetma@pertanian.go.id



Nomor : 25018/KP.430/F4.H/03/2019
Lampiran : 7 berkas
Hal : Penyampaian Bukti pelaporan e-LHKPN tahun 2019

25 Maret 2019

Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 8109/Kpts.430/F/08/2018, tanggal 10 Agustus 2018 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018, Penyelenggara Negara sebagaimana nama-nama tersebut dibawah ini wajib laport harta kekayaan.

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Drh. Agung Suganda, M.Si.	197611252003121001	KPA
2.	Giman, SE.	196604251992031002	PPSPM
3.	Drh. Edy Budi Susila, M.Si.	197404132003121003	PPK -BLU
4.	Drh. Ida Arlita W, M. Biotech	198110242006042001	PPK -RM
5.	Sunarti	197103292007012001	Bend Pengeluaran
6.	Bambang Soegijono, SE.	196603011998031002	Bend Penerimaan
7.	Ganis Basuki Suhartono	196503131990031001	PPBJ

Sehubungan hal tersebut diatas bersama ini kami laporkan bahwa penyelenggara Negara dimaksud telah melaporkan harta kekayaan secara online sesuai aplikasi e-LHKPN yang disyaratkan oleh KPK. Berikut kami lampirkan bukti-bukti pelaporan sebagai berikut;

1. Bukti lembar penyerahan formulir LHKPN.
2. Bukti surat kuasa e-LHKPN bermeterai yang sudah ditandatangani.
3. Bukti pengiriman via pos pelaporan e-LHKPN secara online ke KPK.

Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak Dirjen lebih lanjut.



Drh. Agung Suganda, M.Si

NIP. 197611252003121001

Tembusan Yth:
Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

From: Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
Date: 20 March 2019 06.53.09 GMT+7
To: <agung.suganda@yahoo.com.sg>
Subject: Lembar Penyerahan E-Filing LHKPN

Yth. Sdr AGUNG SUGANDA

KEMENTERIAN PERTANIAN

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : AGUNG SUGANDA
Jabatan : KEPALA PUSAT
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun Pelaporan : 19 Maret 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan

verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpnp@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpnp.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang diuju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

<lkhtisarHarta-200320190653559683.docx>

18,000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



KANTOR POS



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP)
Tempat Tanggal Lahir
Nomor KTP-NIK
Alamat

AGUNG SUGANDA
INDRAMAYU / 25 November 1976
3174042511760010

JILAH RESIDEN NO. 57 JL. M. KAHFI II RT. 13 RW. 009, SRENGSENG SAWAH, JAGAKARSA, KOTA
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada

Penerima Kuasa Pemberian Kuasa ("PKK") beralamat di Jl. Kuningan Perada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

K H U S U

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada kebenaran dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang mewakili kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat/ pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara sehingga sejak tanggal berlakunya jabatan atau berada di bawah pengawasan atau setelah meninggal dunia persis dengan ketentuan pencabutannya dari Pemberi Kuasa.



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP)
Tempat/Tanggal Lahir
Nomor KTP/NIK
Alamat

DRH LINA MARYANA
BANDUNG / 26 Agustus 1980
3174046608880000

JIHAN RESIDEN NO.57 JL. MKAHEI RT.13 RW.009, Kelurahan SRENGSENG SAWAH, Kecamatan JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, Provinsi DKI JAKARTA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pembinaan Koperasi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kaw. 4, Jakarta Selatan, 12930, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi teruskan namun tidak terbatas pada kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Selubungan dengan ini, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotokopi) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Pemberi Kuasa.



20-March-2019
Penerima Kuasa,

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
*) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

6000
(LINA MARYANA)

95104-195

10000

PT POS INDONESIA(Persero)

NPWP : 99.001.520.2.093.000, JL. BUNDA NO. 50 BUNDUNG 40115

SURABAYASELATANGUP 60231A

No.Transaksi : 1960231A00000002735

[PENERIMA]

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEN

JL. MUNDING PERSADA AW 4 SETIAHADI

KOTA ADM. JAWA SELATAN 12950 /TLP.0

[PENGIRIM]

GIRAN

SURABAYA

10000

SURABAYA 60235 /TLP.0

KPRK Tujuan : SURABAYASELATAN 12000

Tanggal Kirim : 22-03-2019 12:41:13

Lokal : NIMEN ARI LAKSHI PUTRI 313002206

Kode Penerima (diisi pengantar)

[]

Kode gagal enter (diisi apv. antaran)

[]

Giriraja Giein

TEK0001

Jenis Kirim : SURAT KILAT NAKSIS

No.Barcode : 1603680001

ISI KIRIM : dokumen

Berat : [Pkg] : 100 Gr, [M] : 0 Gr

Beb : Rp. 14.000

Beb Lain : Rp. 0

Netto : Rp. 14.000

PPH12 : Rp. 0

HUNG : Rp. 1.000 (bermaksud SPM102)

Jumlah : Rp. 15.000

Persyaratan Pengirim :

1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat
pengiriman yang ditetapkan

PT Pos Indonesia (Persero)

2. Nilai pertanggungjawaban isi kirim

Rp. 400.000

KANTOR POS



POS INDONESIA

No. Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

Kepada: gimanraharjo@yahoo.com

Tanggal: Jumat, 22 Maret 2019 08.07 WIB



Pesan ini berisi gambar yang diblokir. [Tampilkan gambar](#) atau [Selalu tampilkan gambar](#)

Yth. Sdr GIMAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	:	GIMAN
Jabatan	:	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun Pelaporan	:	21 Maret 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



IkhtisarHarta-2203201908051644977.docx
59.1kB

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : GIMAN
Tempat/Tanggal Lahir : NGANJUK / 25 April 1966
Nomor KTP/NIK : 3578042504660005
Alamat : Bratang Gede 3-F/16-A, NGAGELREJO, WONOKROMO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -----
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: -----
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



22-March-2019
Pemberi Kuasa,



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(GIMAN)

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : ENDAH ROCHANI
Tempat/Tanggal Lahir : MAGETAN / 26 Mei 1970
Nomor KTP/NIK : 3578046605700001
Alamat : Bratang Gede 3-F/16-A, Kelurahan NGAGELREJO, Kecamatan WONOKROMO, KOTA SURABAYA , Provinsi JAWA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Selhubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



- *) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah





edy susila <edybudisusila@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1 message

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
To: edybudisusila@gmail.com

Mon, Mar 25, 2019 at 3:18 PM

Yth. Sdr EDY BUDI SUSILA

KEMENTERIAN PERTANIAN

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : EDY BUDI SUSILA
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun Pelaporan : 07 Maret 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

KIRI ANEKA USAHA 6023502

Authorized PT POS INDONESIA(PERSON)

Tanggal : 22-03-2019 13:56:22

No.Kresi : 1903221356182360235066163288, Petugas: 602100808

TANDA TERIMA

KIRIMAN DOKUMEN DAN PAKET

Jenis Kiriman : SURAT KILAT KHUSUS

No.Karcode : 16036552119,

Isi Kiriman : Dokumen,

Berat Kiriman : [AM] 100 Gr, [VM] : 0 Gr

PENERIMA :

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PER

JL KUNINGAN PERSADA KAW 4 SETIABUDI

JAKARTA SELATAN

KOTA ADM. JAKARTA SELATAN 12950 /TLP.077111X

Bea : Rp. 14.000

Bea Lain : Rp. 0

Netto : Rp. 14.000

: Rp. 0

HTNB : Rp. 500

+FFN 10%

PENGIRIM :

DRH EDY RUDI S M SI DAN DAN ID

KOMP FUSMETRA NO 2 JL AYANI 68 70 S

URABAYA

SURABAYA 60235 /TLP.0

Jumlah : Rp. 14.500

Kode Penerima

☐

Kode gagal antar

☐

Diterima Oleh,

(Nama Penerima)



KANTORPOS



Lacak status <http://www.posindonesia.co.id>

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



IkhtisarHarta-2503201903181422627.docx

60K

LHKPN
13:27:26

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : EDY BUDI SUSILA

Tempat/Tanggal Lahir : SLEMAN / 13 April 1974

Nomor KTP/NIK : 3578221304740004

Alamat

: Komplek Pusevima Jl. A. Yani No. 68-70, Surabaya, KETINTANG, GAYUNGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S A

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



21-March-2019
Pemberi Kuasa,



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

**) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(EDY BUDI SUSILA)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : EVI AYU LESTARI
Tempat/Tanggal Lahir : TULUNGAGUNG / 19 Juni 1974
Nomor KTP/NIK : 3578221304/40004
Alamat : Komplek Puseveta, Jl. A. Yani No 68-70, Surabaya, Kelurahan KETINTANG, Kecamatan GAYUNGAN, KOTA SURABAYA, Provinsi JAWA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Faniphan Komisi Pemberantasan Korupsi ("PKPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

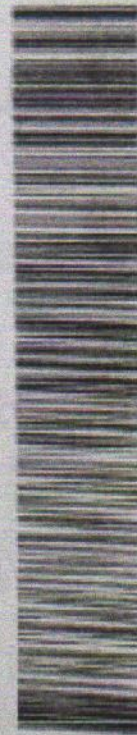
- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintahan yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintahan yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan, keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotokopi) Pemberi Kuasa melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhenti sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



21-March-2019
Pemberi Kuasa,



(EVI AYU LESTARI) **LHKPN**

*1) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

*2) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

13:27:53

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	:	IDA ARLITA WULANDARI
Jabatan	:	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun Pelaporan	:	2018

IBRI ANEKA US44 602356

Authorized PT POS INDONESIA (PERSERO)

Tanggal : 22-03-2019 13:56:22

No.resi : 19032213561822602756616388, Petugas: 602106068

Jenis Kiriman : KIRIMAN DOKUMEN DAN PALET

No. Barcode : 3601 KILAT PLUS

Isi Kiriman : Dokumen,

Berat Kiriman : [kg] 100 gr, [kg] : 0 gr

PERIKSA :

DIREKTORAT PENGAWATAN DAN PEM

JL. KINIRANG PERSADA KAW 4 SETIAHADI

JAKARTA SELATAN

NOTA 6001, JAKOTRA SELATAN 12950 /TLP.0777172

PENGIRIM :

DRH EDY BUDI S M SI DAN DAN IUG

KIRI PUSKERTHA NO 2 81 010001 60 70 5

URABAYA

310000 60235 /TLP.0

Kode Perkiraan :

Kode barang antara :

Interline (leth.



KANTORPOS

Lacak status <http://www.posindonesia.co.id>

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : IDA ARLITA WULANDARI
Terpap/Tanggal Lahir : BANYUWANGI / 24 Oktober 1981
Nomor KTP/NIK : 3578226410810001
Alamat : Jl. A. Yani 68-70 Surabaya, KETINTANG, GAYUNGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



25-March-2019
Pemberi Kuasa.

Meterai
Rp. 6000,-

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(IDA ARLITA WULANDARI)

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



KANTORPOS

Local status http://www.postindonesia.co.id



3/25/2019

Gmail - Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN



Iqbal Rinaldhi <iqbalnarti@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
Kepada: iqbalnarti@gmail.com

26 Februari 2019 14.05

Yth. Sdr SUNARTI

KEMENTERIAN PERTANIAN

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SUNARTI
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2018

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

IkhtisarHarta-2602201902551318558.docx
61K

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : SUNARTI

Tempat/Tanggal Lahir : NGANJUK / 29 Maret 1971

Nomor KTP/NIK : 3578026903710001

Alamat : JL. MARGOREJO 75 G SURABAYA, MARGOREJO, WONOCOLO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia, atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



26-February-2019
Pemberi Kuasa,



(SUNARTI)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama (sesuai dengan KTP) : SLAMET RIADI
Tempat/Tanggal Lahir : NGANJUK / 8 November 1967
Nomor KTP/NIK : 3578020811670002
Alamat : JL. MARGOREJO 75 SURABAYA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



26-February-2019
Pemberi Kuasa,



7-

*) Lamberan ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(SLAMET RIADI)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : FITRI AINURROSYIDHAH
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA / 11 Maret 1998
Nomor KTP/NIK : 3578045103980010
Alamat : JL. MARGOREJO 75 SURABAYA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklasifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



26-February-2019
Pemberi Kuasa,



(FITRI AINURROSYIDHAH)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : MOCH. IQBAL RINALDHI

Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA / 19 Mei 1996

Nomor KTP/NIK : 3578041905960010

Alamat : JL. MARGOREJO 75 SURABAYA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



26-February-2019
Pemberi Kuasa,



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(MOCH. IQBAL RINALDHI)



bambang soegijono <bambangsoegijono@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
Kepada: bambangsoegijono@gmail.com

16 Februari 2019 11.20

Yth. Sdr BAMBANG SOEGIJONO

KEMENTERIAN PERTANIAN

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : BAMBANG SOEGIJONO
Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2018

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

IkhtisarHarta-1602201911201269184.docx
60K

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : BAMBANG SOEGLIJONO
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA / 1 Maret 1966
Nomor KTP/NIK : 3578050103660005
Alamat : Jl. A. Yani 68-70, KETINTANG, GAYUNGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/atau perusahaan.

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



25-March-2019
Pemberi Kuasa,

Meterai
Rp. 6000,-

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

**) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(BAMBANG SOEGLIJONO)



amelia ganis <ameliaganis2019@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
To: ameliaganis2019@gmail.com

Mon, Mar 25, 2019 at 4:49 PM

Yth. Sdr GANIS BASUKI SUHARTONO

KEMENTERIAN PERTANIAN

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : GANIS BASUKI SUHARTONO
Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun Pelaporan : 31 Desember 2018

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

IkhtisarHarta-2503201904491659395.docx
60K

REKAPITULASI

PERIODE 1 JANUARI 2019 - 31 DESEMBER 2019

REKAPITULASI

PERIODE 1 JANUARI 2019 - 31 DESEMBER 2019

(RUMAH)

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

(RUMAH)

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

(RUMAH)

REKAPITULASI PERIODE 1

(RUMAH)

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

097625101

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

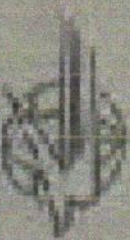
REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

REKAPITULASI PERIODE 1

KANTOR POS



POS INDONESIA

LAJANG SURAT (HUTUP) PUSAT SURAT SURAT SURAT

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : GANIS BASUKI SUHARTONO
Tempat/Tanggal Lahir : JOMBANG / 13 Maret 1965
Nomor KTP/NIK : 3578221303650001
Alamat : JL. A YANI 68-70 SURABAYA, KETINTANG, GAYUNGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



(GANIS BASUKI SUHARTONO)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah